

Kerangka Acuan
Workshop “Penerapan Pembayaran Berbasis Kinerja dalam Implementasi Program
FCPF-CF 2020-2024 serta Implementasi NDC dan Perpres No.98 Tahun 2021
di Provinsi Kalimantan Timur”
Samarinda, 10 Desember 2021

A. Latar Belakang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Oktober 2015 telah memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui Program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) yang dikelola oleh Bank Dunia. FCPF Program Carbon Fund adalah implementasi program untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dengan skema pembayaran berbasis kinerja. Untuk mendapatkan pembayaran berbasis kinerja (*Results Based Payment*) periode implementasi 2020-2024 terkait FCPF *Carbon Fund* di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Indonesia telah menyusun dokumen program penurunan emisi atau ERPD (*Emission Reduction Program Document*) yang memuat berbagai informasi penting terkait pelaksanaan program REDD+ berbasis yurisdiksi di Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan berbagai kriteria dan indikator yang ada dalam kerangka metodologi FCPF *Carbon Fund* sebelum menandatangani kesepakatan pembayaran upaya penurunan emisi atau ERPA (*Emission Reduction Payment Agreement*) dengan FCPF *Carbon Fund*.

Mekanisme pembagian manfaat menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam implementasi program penurunan emisi FCPF-CF tahun 2020-2024 di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat beberapa hal penting di dalam mekanisme pembagian manfaat antara lain: 1) dukungan kebijakan nasional dalam pembagian manfaat di tingkat Provinsi Kaltim, 2) upaya-upaya yang telah disiapkan Pemprov Kaltim dalam pengembangan mekanisme pembagian manfaat, 3) internalisasi program penurunan emisi FCPF-CF kedalam RPJMD provinsi dan kabupaten, 4) keterlibatan masyarakat dan manfaat/insentif apa yang akan diterima oleh masyarakat, 5) keterlibatan sektor swasta dan manfaat apa yang akan diterima oleh sektor swasta. Saat ini, Peraturan Presiden Republik Indonesia No.98 Tahun 2021 telah terbit sehingga diperlukan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Program FCPF-CF.

Untuk lebih banyak memberikan informasi dan pemahaman terkait mekanisme pembagian manfaat yang akan dilakukan selama kegiatan implementasi program penurunan emisi FCPF-CF tahun 2020-2024, maka dirasa perlu dilakukan acara **Workshop “Penerapan Pembayaran Berbasis Kinerja dalam Implementasi Program FCPF-CF 2020-2024 serta Implementasi NDC dan Perpres No.98 Tahun 2021** kepada para pihak terkait di Kalimantan Timur.

B. Tujuan

Menyampaikan mekanisme pembagian manfaat yang akan dilakukan selama kegiatan implementasi program penurunan emisi FCPF-CF tahun 2020-2024 serta Implementasi NDC dan Perpres No.98 Tahun 2021 kepada para pihak terkait di Kalimantan Timur.

C. Hasil yang diharapkan

Tersampainya mekanisme pembagian manfaat yang akan dilakukan selama kegiatan implementasi program penurunan emisi FCPF-CF tahun 2020-2024 serta Implementasi NDC dan Perpres No.98 Tahun 2021 kepada para pihak terkait di Kalimantan Timur.

D. Tata waktu pelaksanaan

Workshop “Penerapan Pembayaran Berbasis Kinerja dalam Implementasi Program FCPF-CF 2020-2024 serta Implementasi NDC dan Perpres No.98 Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur” akan dilaksanakan pada :

Hari /Tanggal : Jumat, 10 Desember 2021
Waktu : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Rapat Rektorat Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur

E. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu	Acara	Keterangan
Jumat, 10 Desember 2021		
09.00 – 09.15	Registrasi	Tim PMU BioCF dan MS2R
09.15 – 11.00	Pembukaan	- Menteri KLHK - Dirjen PPI - Gubernur Prov. Kalimantan Timur
11.00 – 12.00	Paparan 1: Workshop FCPF-CF: pentingnya mekanisme pembagian manfaat yang akan dilakukan selama kegiatan implementasi program penurunan emisi FCPF-CF tahun 2020-2024 Diskusi dan tanya jawab	Narasumber: PIC FCPF-CF, Kaltim Moderator: PIC FCPF-CF, Kaltim
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.15 – 14.30	Paparan 2: Workshop FCPF-CF: Gambaran umum program FCPF-CF, aspek-aspek regulasi, kelembagaan dan teknis BSP, keterkaitan dengan kerangka kerja investasi Diskusi dan tanya jawab	Narasumber: PIC FCPF-CF, Kaltim Moderator: PIC FCPF-CF, Kaltim
14.30 – 14.45	<i>Coffee Break</i>	
14.45 – 16.30	Paparan 3:	Narasumber: PIC DJPPI - KLHK

	Implementasi NDC dan Perpres No.98 Tahun 2021 Diskusi dan tanya jawab	Moderator: PIC DJPPI - KLHK
16.30 – 17.00	Penutup	Dr. Ignatius Wahyu Marjaka (Direktur MSZR)

F. Peserta

No.	Nama	Jumlah (orang)
A. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi		
1.	Gubernur Prov. Jambi	1
2.	Sekretaris Daerah Prov. Jambi	1
3.	Kepala BAPPEDA Prov. Jambi	1
4.	Ketua Sub Nasional PMU BioCF-ISFL	1
5.	Wakil Ketua Sub Nasional PMU BioCF-ISFL	1
6.	Tim Teknis SN-PMU Divisi BSP BioCF-ISFL	2
B. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur		
7.	Gubernur Provinsi Kalimantan Timur	1
8.	Sekda Provinsi Kalimantan Timur	1
9.	Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur	1
10.	Biro Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur	1
11.	Biro Infrastruktur Provinsi Kalimantan Timur	1
12.	Biro Humas dan Kerja Sama Provinsi Kalimantan Timur	1
13.	Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur	1
14.	Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	1
15.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	1
16.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1
17.	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	1
19.	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur	1
20.	Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur	1
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1
22.	Kepala Bidang Ekonomu Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	1
23.	Kepala Sub Bagaian Perencanaan Program Dishut Provinsi Kalimantan Timur	1
24.	Kepala Sub Bagaian Perencanaan Program DLH Provinsi Kalimantan Timur	1
25.	Kepala Sub Bagaian Perencanaan Program Disbun Provinsi Kalimantan Timur	1
26.	Kepala Sub Bagaian Perencanaan Program Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur	1
27.	KPH Bengalon	1
28.	KPH Kendilo	1

29.	KPH DAS Belayan	1
30.	KPH Berau Barat	1
31.	KPH Bongan	1
32.	KPH Santan	1
33.	KPH Meratus	1
34.	KPH Batu Ayau	1
35.	KPH Tahura	1
C. Pemerintah Pusat Kementerian LHK		
36.	Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektor dan Regional	1
37.	Direktur Mitigasi Perubahan Iklim	1
38.	Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV	1
39.	Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Pendanaan	1
40.	Kepala Sub Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon	1
41.	Kepala Seksi Skema Pembiayaan dan Skema Insentif	1
42.	Kepala Seksi Jejaring Mitra REDD+	1
43.	Staf Sub Direktorat Sumberdaya Pendanaan	2
D. Akademisi/NGO/Kelompok Kerja		
44.	Rektor Universitas Mulawarman	1
45.	Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman	1
46.	Dr. I Wayan Susi Dharmawan – Peneliti BLI KLHK, Mantan Koordinator Program FCPF-CF	1
47.	Politani Negeri Samarinda	1
48.	Politeknik Negeri Samarinda	1
49.	UNTAG 17 Agustus 1945	1
50.	GGGI	1
51.	GIZ FORCLIME	1
52.	AMAN Kaltim	1
53.	Yayasan Bioma	1
54.	Yayasan Bumi	1
55.	Yayasan Belantara	1
56.	Planete Urgence	1
57.	KBCF	1
58.	Pokja Perhutanan Sosial	1
59.	Forum DAS	1
E. Swasta		
60.	APHI	1
61.	GAPKI	1
62.	APBI	
F. Individual Consultant BioCF-ISFL		
63.	Dr. Eri Indrawan – <i>Deputy Project Coordinator</i>	1
64.	Riko Wahyudi – <i>BSM Specialist</i>	1
65.	Jaya Nofyandri, SH – <i>Sub Nasional Project Coordinator</i>	1
66.	PMU BioCF-ISFL	1